

SK. Sekolah (MIP/SMK) yg telah
diperbaiki.



**KEPUTUSAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NO : 0203/O/1991 TANGGAL : 30 MEI 1991

**TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1990/1991**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1991**

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0283/U/1991
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PEKERIAHAN SEKOLAH
TARBIH PELAJARAN 1990/1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

bahwa dalam rangka memenuhi jumlah kebutuhan Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk tahun Pelajaran 1990/1991, di pandang perlu membuka TK, SLB, SLTP, SLTA Negeri baru dan menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 dan 29 Tahun 1990.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/H Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
 - d. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989;
 - e. Nomor 226/H Tahun 1985;
 - f. Nomor 64/H Tahun 1988.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/0/1978 Tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0296/0/1978 Tanggal 3 September 1978;
 - c. Nomor 0370/0/1978 dan Nomor 0371/0/1978 Tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 090/0/1979 Tanggal 26 Mei 1979;
 - e. Nomor 0222b/0/1980 Tanggal 11 September 1980;
 - f. Nomor 0173/0/1983 Tanggal 14 Maret 1983;
 - g. Nomor 0240/0/1985 Tanggal 5 Juni 1985;
 - h. Nomor 064/0/1987 Tanggal 16 Januari 1987;

Menyerahkan: Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B-277/1/1991 Tanggal 25 Maret 1991.

M E M U I U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri serta menyerahkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan menjadi SLTP dan SLTA Negeri, di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan ini.
- Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja serta struktur organisasi TK, SLB, SLTP dan SLTA Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, dan V pada diktum pertama diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/0/1978 Tanggal 2 September 1978;
 - b. Nomor 0296/0/1978 Tanggal 3 September 1978;
 - c. Nomor 0370/0/1978 Tanggal 22 Desember 1978;
 - d. Nomor 0371/0/1978 Tanggal 22 Desember 1978;
 - e. Nomor 090/0/1979 Tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

- Kemapat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang relevan dengan itu sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran VI Keputusan ini.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| a. IK Negeri ada | 59 buah; |
| b. SLB Negeri ada | 23 buah; |
| c. SMP Negeri ada | 7.178 buah; |
| d. SMA Negeri ada | 1.722 buah; |
| e. SMT Pertanian Negeri ada | 29 buah; |
| f. SHIK Negeri ada | 9 buah. |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut tanggal 1 April 1991.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Mei 1991

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Setretaris Jenderal

LLd.

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan Perum dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Pertahanan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

Kepala Bagian Pengundangan Peraturan
Perundang-undangan,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan Forum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
9. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di Propinsi,
10. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
11. Badan Pemeriksa Keuangan,
12. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
13. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
14. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Sub-Bagian Penggandaan Peraturan Perundang-undangan,



Salinan sesuai aslinya

Kepala Bidang Ditmenum

Bidang Soksi Tenaga Teknis,



NIP. 13034052

1	2	3	4	5	6	7
		36. SMA Negeri 1 Marioriawa ✓	-	Marioriawa	Kabupaten Soppeng	
		37. SMA Negeri 1 Larompong ✓	-	Larompong	Kabupaten Luwu	
		38. SMA Negeri 1 Bontomatene ✓	-	Bontomatene ✓	Kabupaten Selayar	

Ditidin sesuai aslinya





GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 99 TAHUN 2017

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri;
- b. bahwa sehubungan maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas Negeri Pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Menengah Atas Negeri pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.
10. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPT Sekolah Menengah Atas Negeri.

- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh Kepala UPT, dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPT Pendidikan Wilayah yang mewilayahi masing-masing UPT.

BAB III **SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT Sekolah;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV **TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS**

Bagian Kesatu **Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah**

Pasal 4

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
- k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
- l. mengoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- m. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
- n. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
- o. mengoordinasikan , mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
- q. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
- r. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri;
- s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;
- t. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Tugas dan Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program UPT;
- h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- i. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;
- j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan hukum;
- k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;
- l. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
- m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;
- n. mengoordinasikan dan melakukan pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- o. mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;
- p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 8

- (1) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Kepala UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan proses belajar mengajar serta untuk mendukung kegiatan kepegawaian Kepala UPT dapat membentuk satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT dengan Keputusan Kepala UPT.

- (2) Pembentukan satuan tugas/ unit kerja, kepengurusan, pengelola, dan/atau nama lainnya dalam UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Kepala UPT wilayah masing-masing.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 26 Januari 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,



D. H. SYAHRIEL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 27 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,**



D. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 99

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

BAGAN STRUKTUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI SELATAN



 **GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.

LAMPIRAN II

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

: 99 TAHUN 2017

: 26 JANUARI 2017

: ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN

**DAFTAR NAMA-NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BANTAENG	SMAN 1 BANTAENG
2	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 BISSAPU	SMAN 2 BANTAENG
3	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 TOMPOBULU	SMAN 3 BANTAENG
4	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 2 BANTAENG	SMAN 4 BANTAENG
5	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 EREMERASA	SMAN 5 BANTAENG
6	UPT. Wil. Bantaeng	SMA NEGERI 1 ULU ERE	SMAN 6 BANTAENG
7	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 BARRU	SMAN 1 BARRU
8	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 SOPPENG RIAJA	SMAN 2 BARRU
9	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE RILAU	SMAN 3 BARRU
10	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 MALLUSETASI	SMAN 4 BARRU
11	UPT. Wil. Barru	SMAN 1 TANETE RIAJA	SMAN 5 BARRU
12	UPT. Wil. Barru	SMAN 2 BARRU	SMAN 6 BARRU
13	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 WATAMPONE	SMAN 1 BONE
14	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 MARE	SMAN 2 BONE
15	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 WATAMPONE	SMAN 3 BONE
16	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AJANGALE	SMAN 4 BONE
17	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAPPARIAJA	SMAN 5 BONE
18	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAHU	SMAN 6 BONE
19	UPT. Wil. Bone	SMAN 5 WATAMPONE	SMAN 7 BONE
20	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 KAJUARA	SMAN 8 BONE
21	UPT. Wil. Bone	SMAN 3 WATAMPONE	SMAN 9 BONE
22	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TONRA	SMAN 10 BONE
23	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LIBURENG	SMAN 11 BONE
24	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SIBULUE	SMAN 12 BONE
25	UPT. Wil. Bone	SMAN 4 WATAMPONE	SMAN 13 BONE
26	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 TELLUSIATTINGE	SMAN 14 BONE
27	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 ULAWENG	SMAN 15 BONE
28	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AWANGPONE	SMAN 16 BONE
29	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 LAMURU	SMAN 17 BONE
30	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 CINA	SMAN 18 BONE
31	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 PATIMPENG	SMAN 19 BONE
32	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 AMALI	SMAN 20 BONE
33	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 SALOMEKKO	SMAN 21 BONE
34	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 LIBURENG	SMAN 22 BONE
35	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 BONTOCANI	SMAN 23 BONE
36	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 DUA BOCCOE	SMAN 24 BONE

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
		3	4
1	2		
37	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 BENGGO	SMAN 25 BONE
38	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 CENRANA	SMAN 26 BONE
39	UPT. Wil. Bone	SMAN 2 CENRANA	SMAN 27 BONE
40	UPT. Wil. Bone	SMAN 1 PONRE	SMAN 28 BONE
41	UPT. Wil. Bone	SMA NEGERI 1 TELLU LIMPOE	SMAN 29 BONE
42	UPT. Wil. Bone	SMA NEGERI 1 PALAKKA	SMAN 30 BONE
43	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 1 BULUKUMBA	SMAN 1 BULUKUMBA
44	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 2 BULUKUMBA	SMAN 2 BULUKUMBA
45	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 3 BULUKUMBA	SMAN 3 BULUKUMBA
46	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 4 BULUKUMBA	SMAN 4 BULUKUMBA
47	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 5 BULUKUMBA	SMAN 5 BULUKUMBA
48	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 6 BULUKUMBA	SMAN 6 BULUKUMBA
49	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 7 BULUKUMBA	SMAN 7 BULUKUMBA
50	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 8 BULUKUMBA	SMAN 8 BULUKUMBA
51	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 9 BULUKUMBA	SMAN 9 BULUKUMBA
52	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 10 BULUKUMBA	SMAN 10 BULUKUMBA
53	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 11 BULUKUMBA	SMAN 11 BULUKUMBA
54	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 12 BULUKUMBA	SMAN 12 BULUKUMBA
55	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 13 BULUKUMBA	SMAN 13 BULUKUMBA
56	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 14 BULUKUMBA	SMAN 14 BULUKUMBA
57	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 15 BULUKUMBA	SMAN 15 BULUKUMBA
58	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 16 BULUKUMBA	SMAN 16 BULUKUMBA
59	UPT. Wil. Bulukumba	SMAN 17 BULUKUMBA	SMAN 17 BULUKUMBA
60	UPT. Wil. Bulukumba	SMA NEGERI 18 BULUKUMBA	SMAN 18 BULUKUMBA
61	UPT. Wil. Bulukumba	SMA NEGERI 19 BULUKUMBA	SMAN 19 BULUKUMBA
62	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 ANGGERAJA	SMAN 1 ENREKANG
63	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 ENREKANG	SMAN 2 ENREKANG
64	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 ALLA	SMAN 3 ENREKANG
65	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 MAIWA	SMAN 4 ENREKANG
66	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 BARAKA	SMAN 5 ENREKANG
67	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 MALUA	SMAN 6 ENREKANG
68	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 CENDANA	SMAN 7 ENREKANG
69	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 BUNGIN	SMAN 8 ENREKANG
70	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 CURIO	SMAN 9 ENREKANG
71	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 PASUI	SMAN 10 ENREKANG
72	UPT. Wil. Enrekang	SMAN 1 MASALLE	SMAN 11 ENREKANG
73	UPT. Wil. Enrekang	SMA Negeri 2 Enrekang	SMAN 12 ENREKANG
74	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 SUNGGUMINASA	SMAN 1 GOWA
75	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BAJENG	SMAN 2 GOWA
76	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BONTONOMPO	SMAN 3 GOWA
77	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 TINGGIMONCONG	SMAN 4 GOWA
78	UPT. Wil. Gowa	SMAN 2 TINGGI MONCONG	SMAN 5 GOWA
79	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 PARANGLOE	SMAN 6 GOWA
80	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 TOMPOBULU	SMAN 7 GOWA

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
81	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BONTOMARANNU	SMAN 8 GOWA
82	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 PALLANGGA	SMAN 9 GOWA
83	UPT. Wil. Gowa	SMAN 2 SUNGGUMINASA	SMAN 10 GOWA
84	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 TOMBOLO PAO	SMAN 11 GOWA
85	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 PARIGI	SMAN 12 GOWA
86	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BONTONOMPO SELATAN	SMAN 13 GOWA
87	UPT. Wil. Gowa	SMAN 3 SUNGGUMINASA	SMAN 14 GOWA
88	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BONTOLEMPANGAN	SMAN 15 GOWA
89	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BIRINGBULU	SMAN 16 GOWA
90	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BUNGAYA	SMAN 17 GOWA
91	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 MANUJU	SMAN 18 GOWA
92	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 BAJENG BARAT	SMAN 19 GOWA
93	UPT. Wil. Gowa	SMAN 2 PALLANGGA	SMAN 20 GOWA
94	UPT. Wil. Gowa	SMAN 1 PATTALLASSANG	SMAN 21 GOWA
95	UPT. Wil. Gowa	SMA NEGERI 1 BAROMBONG	SMAN 22 GOWA
96	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BINAMU	SMAN 1 JENEPONTO
97	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 TAMALATEA	SMAN 2 JENEPONTO
98	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 2 BINAMU	SMAN 3 JENEPONTO
99	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BANGKALA BARAT	SMAN 4 JENEPONTO
100	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BATANG	SMAN 5 JENEPONTO
101	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 KELARA	SMAN 6 JENEPONTO
102	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BANGKALA	SMAN 7 JENEPONTO
103	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 TURATEA	SMAN 8 JENEPONTO
104	UPT. Wil. Jeneponto	SMA NEGERI KHUSUS JENEPONTO	SMAN 9 JENEPONTO
105	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 BONTORAMBA	SMAN 10 JENEPONTO
106	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 1 ARUNGKEKE	SMAN 11 JENEPONTO
107	UPT. Wil. Jeneponto	SMAN 2 BONTORAMBA	SMAN 12 JENEPONTO
108	UPT. Wil. Jeneponto	SMA Negeri 2 Tamalatea	SMAN 13 JENEPONTO
109	UPT. Wil. Jeneponto	SMA Negeri 1 Rumbia	SMAN 14 JENEPONTO
110	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BENTENG	SMAN 1 SELAYAR
111	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BONTOMATENE	SMAN 2 SELAYAR
112	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BONTOSIKUYU	SMAN 3 SELAYAR
113	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 PASIMASUNGGU TIMUR	SMAN 4 SELAYAR
114	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 TAKA BONERATE	SMAN 5 SELAYAR
115	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 PASIMARANNU	SMAN 6 SELAYAR
116	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BONTOHARU	SMAN 7 SELAYAR
117	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMAN 1 BUKI	SMAN 8 SELAYAR
118	UPT. Wil. Kepulauan Selayar	SMA NEGERI 1 BONTOMANAI	SMAN 9 SELAYAR
119	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BELOPA	SMAN 1 LUWU
120	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 WALENRANG	SMAN 2 LUWU
121	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 LAROMPONG	SMAN 3 LUWU

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
122	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BUA PONRANG	SMAN 4 LUWU
123	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BAJO	SMAN 5 LUWU
124	UPT. Wil. Luwu	SMA NEGERI 2 WALENRANG	SMAN 6 LUWU
125	UPT. Wil. Luwu	SMAN 2 BELOPA	SMAN 7 LUWU
126	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BASTEM	SMAN 8 LUWU
127	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BOSSO	SMAN 9 LUWU
128	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 BUA	SMAN 10 LUWU
129	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 LAMASI	SMAN 11 LUWU
130	UPT. Wil. Luwu	SMAN 01 UNGGULAN KAMANRE	SMAN 12 LUWU
131	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 LAROMPONG SELATAN	SMAN 13 LUWU
132	UPT. Wil. Luwu	SMAN 2 BAJO	SMAN 14 LUWU
133	UPT. Wil. Luwu	SMAN 2 BUA PONRANG	SMAN 15 LUWU
134	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 LATIMOJONG	SMAN 16 LUWU
135	UPT. Wil. Luwu	SMAN 3 BAJO	SMAN 17 LUWU
136	UPT. Wil. Luwu	SMAN 1 SULI BARAT	SMAN 18 LUWU
137	UPT. Wil. Luwu	SMAN 2 BASTEM	SMAN 19 LUWU
138	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 MALILI	SMAN 1 LUWU TIMUR
139	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 WOTU	SMAN 2 LUWU TIMUR
140	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 TOWUTI	SMAN 3 LUWU TIMUR
141	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 MANGKUTANA	SMAN 4 LUWU TIMUR
142	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 WASUPONDA	SMAN 5 LUWU TIMUR
143	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 ANGKONA	SMAN 6 LUWU TIMUR
144	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 BURAU	SMAN 7 LUWU TIMUR
145	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 TOMONI	SMAN 8 LUWU TIMUR
146	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN KALAENA	SMAN 9 LUWU TIMUR
147	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 TOMONI TIMUR	SMAN 10 LUWU TIMUR
148	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 1 NUHA	SMAN 11 LUWU TIMUR
149	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 2 MALILI	SMAN 12 LUWU TIMUR
150	UPT. Wil. Luwu Timur	SMAN 2 TOWUTI	SMAN 13 LUWU TIMUR
151	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 MASAMBA	SMAN 1 LUWU UTARA
152	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 SUKAMAJU	SMAN 2 LUWU UTARA
153	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 BAEBUNTA	SMAN 3 LUWU UTARA
154	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 BONE BONE	SMAN 4 LUWU UTARA
155	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 SABBANG	SMAN 5 LUWU UTARA
156	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 MALANGKE BARAT	SMAN 6 LUWU UTARA
157	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 2 BAEBUNTA	SMAN 7 LUWU UTARA

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
158	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 2 MASAMBA	SMAN 8 LUWU UTARA
159	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 MAPPEDECENG	SMAN 9 LUWU UTARA
160	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 2 SUKAMAJU	SMAN 10 LUWU UTARA
161	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 MALANGKE	SMAN 11 LUWU UTARA
162	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 TANA LILI	SMAN 12 LUWU UTARA
163	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 SEKO	SMAN 13 LUWU UTARA
164	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 LIMBONG	SMAN 14 LUWU UTARA
165	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 1 RAMPI	SMAN 15 LUWU UTARA
166	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 3 BAEBUNTA	SMAN 16 LUWU UTARA
167	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 2 MALANGKE	SMAN 17 LUWU UTARA
168	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 2 SABBANG	SMAN 18 LUWU UTARA
169	UPT. Wil. Luwu Utara	SMAN 3 MASAMBA	SMAN 19 LUWU UTARA
170	UPT. Wil. Maros	SMAN 1 (SSN) MAROS	SMAN 1 MAROS
171	UPT. Wil. Maros	SMAN 2 CAMBA - MAROS	SMAN 2 MAROS
172	UPT. Wil. Maros	SMAN 3 LAU MAROS	SMAN 3 MAROS
173	UPT. Wil. Maros	SMAN 4 BANTIMURUNG	SMAN 4 MAROS
174	UPT. Wil. Maros	SMAN 5 TANRALILI - MAROS	SMAN 5 MAROS
175	UPT. Wil. Maros	SMAN 6 BONTOA - MAROS	SMAN 6 MAROS
176	UPT. Wil. Maros	SMAN 7 MALLAWA - MAROS	SMAN 7 MAROS
177	UPT. Wil. Maros	SMAN 8 MANDAI - MAROS	SMAN 8 MAROS
178	UPT. Wil. Maros	SMAN 9 MARUSU - MAROS	SMAN 9 MAROS
179	UPT. Wil. Maros	SMAN 10 SIMBANG - MAROS	SMAN 10 MAROS
180	UPT. Wil. Maros	SMAN 11 MAROS BARU	SMAN 11 MAROS
181	UPT. Wil. Maros	SMAN 12 CENRANA - MAROS	SMAN 12 MAROS
182	UPT. Wil. Maros	SMAN 13 TOMPOBULU - MAROS	SMAN 13 MAROS
183	UPT. Wil. Maros	SMAN 14 MONCONGLOE	SMAN 14 MAROS
184	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 PANGKAJENE	SMAN 1 PANGKEP
185	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 SEGERI	SMAN 2 PANGKEP
186	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 BUNGORO	SMAN 3 PANGKEP
187	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 LABAKKANG	SMAN 4 PANGKEP
188	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 LIUKANG KALMAS	SMAN 5 PANGKEP
189	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 LIUKANG TANGAYA	SMAN 6 PANGKEP

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
190	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 LIUKANG TUPABBIRING	SMAN 7 PANGKEP
191	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 TONDONG TALLASA	SMAN 8 PANGKEP
192	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 MA'RANG	SMAN 9 PANGKEP
193	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN TERBUKA BUNGORO	SMAN 10 PANGKEP
194	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 2 PANGKAJENE	SMAN 11 PANGKEP
195	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 1 LIUKANG TUPABBIRING UTARA	SMAN 12 PANGKEP
196	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 2 LABAKKANG BOARDING SCHOOL	SMAN 13 PANGKEP
197	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 2 LIUKANG KALMAS	SMAN 14 PANGKEP
198	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 2 LIUKANG TANGAYA	SMAN 15 PANGKEP
199	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMA NEGERI 2 LIUKANG TUPABIRING	SMAN 16 PANGKEP
200	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMA NEGERI 3 LIUKANG KALMAS	SMAN 17 PANGKEP
201	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMAN 3 LIUKANG TANGAYA	SMAN 18 PANGKEP
202	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMA NEGERI 1 BALOCCI	SMAN 19 PANGKEP
203	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMA NEGERI 3 PANGKAJENE	SMAN 20 PANGKEP
204	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMA NEGERI KECIL PULAU SATANDO	SMAN 21 PANGKEP
205	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMA NEGERI KECIL PULAU SAMATELLU	SMAN 22 PANGKEP
206	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMA NEGERI KECIL PULAU LAIYA	SMAN 23 PANGKEP
207	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMA NEGERI KECIL PULAU KARANRANG	SMAN 24 PANGKEP
208	UPT. Wil. Pangkajene Kepulauan	SMA NEGERI KECIL PULAU KOLAMBING	SMAN 25 PANGKEP
209	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 1 PINRANG	SMAN 1 PINRANG
210	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 2 PINRANG	SMAN 2 PINRANG
211	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 3 PINRANG	SMAN 3 PINRANG
212	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 4 PINRANG	SMAN 4 PINRANG
213	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 5 PINRANG	SMAN 5 PINRANG

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
214	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 6 PINRANG	SMAN 6 PINRANG
215	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 7 PINRANG	SMAN 7 PINRANG
216	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 8 PINRANG	SMAN 8 PINRANG
217	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 9 PINRANG	SMAN 9 PINRANG
218	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 10 PINRANG	SMAN 10 PINRANG
219	UPT. Wil. Pinrang	SMA NEGERI 11 UNGGULAN PINRANG	SMAN 11 PINRANG
220	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 1 PANCA RIJANG	SMAN 1 SIDRAP
221	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 1 PANGSID	SMAN 2 SIDRAP
222	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 1 DUA PITUE	SMAN 3 SIDRAP
223	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 2 PANCA RIJANG	SMAN 4 SIDRAP
224	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 1 TELLU LIMPOE	SMAN 5 SIDRAP
225	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 1 WATANG PULU	SMAN 6 SIDRAP
226	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 1 PITU RIAWA	SMAN 7 SIDRAP
227	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 1 PANCA LAUTANG	SMAN 8 SIDRAP
228	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 1 PITU RIASE	SMAN 9 SIDRAP
229	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 1 BARANTI	SMAN 10 SIDRAP
230	UPT. Wil. Sidenreng Rappang	SMAN 2 PANGSID	SMAN 11 SIDRAP
231	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 1 SINJAI	SMAN 1 SINJAI
232	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 1 SINJAI SELATAN	SMAN 2 SINJAI
233	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 1 SINJAI TIMUR	SMAN 3 SINJAI
234	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 1 BULUPODDO	SMAN 4 SINJAI
235	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 2 SINJAI	SMAN 5 SINJAI
236	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 1 SINJAI BARAT	SMAN 6 SINJAI
237	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 1 SINJAI TENGAH	SMAN 7 SINJAI
238	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 1 SINJAI BORONG	SMAN 8 SINJAI
239	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 1 TELLULIMPOE	SMAN 9 SINJAI
240	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 3 SINJAI	SMAN 10 SINJAI
241	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 2 SINJAI SELATAN	SMAN 11 SINJAI
242	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 3 SINJAI SELATAN	SMAN 12 SINJAI
243	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 2 SINJAI TENGAH	SMAN 13 SINJAI
244	UPT. Wil. Sinjai	SMAN 2 SINJAI BARAT	SMAN 14 SINJAI
245	UPT. Wil. Soppeng	SMAN 1 WATANSOPPENG	SMAN 1 SOPPENG
246	UPT. Wil. Soppeng	SMAN 1 LILIARIAJA	SMAN 2 SOPPENG
247	UPT. Wil. Soppeng	SMAN 1 DONRI-DONRI	SMAN 3 SOPPENG
248	UPT. Wil. Soppeng	SMAN 2 WATANSOPPENG	SMAN 4 SOPPENG
249	UPT. Wil. Soppeng	SMAN 1 MARIORIWAWO	SMAN 5 SOPPENG
250	UPT. Wil. Soppeng	SMAN 1 MARIORIAWA	SMAN 6 SOPPENG
251	UPT. Wil. Soppeng	SMAN 1 LILIRILAU	SMAN 7 SOPPENG
252	UPT. Wil. Soppeng	SMAN 3 WATANSOPPENG	SMAN 8 SOPPENG
253	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 TAKALAR	SMAN 1 TAKALAR

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
254	UPT. Wil. Takalar	SMAN 2 TAKALAR	SMAN 2 TAKALAR
255	UPT. Wil. Takalar	SMAN 3 TAKALAR	SMAN 3 TAKALAR
256	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 GALESONG UTARA	SMAN 4 TAKALAR
257	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 GALESONG SELATAN	SMAN 5 TAKALAR
258	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 POLONGBANGKENG UTARA	SMAN 6 TAKALAR
259	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 MANGARABOMBANG	SMAN 7 TAKALAR
260	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 POLOMBANGKENG SELATAN	SMAN 8 TAKALAR
261	UPT. Wil. Takalar	SMAN 2 POLONGBANGKENG UTARA	SMAN 9 TAKALAR
262	UPT. Wil. Takalar	SMAN 1 MAPPAKASUNGGU	SMAN 10 TAKALAR
263	UPT. Wil. Takalar	SMAN 3 POLONGBANGKENG UTARA	SMAN 11 TAKALAR
264	UPT. Wil. Takalar	SMAN 2 MAPPAKASUNGGU	SMAN 12 TAKALAR
265	UPT. Wil. Takalar	SMAN 2 GALESONG SELATAN	SMAN 13 TAKALAR
266	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 MAKALE	SMAN 1 TANA TORAJA
267	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 2 MAKALE	SMAN 2 TANA TORAJA
268	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 MENGKENDEK	SMAN 3 TANA TORAJA
269	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 SANGALLA	SMAN 4 TANA TORAJA
270	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 3 MAKALE	SMAN 5 TANA TORAJA
271	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 RANTETAYO	SMAN 6 TANA TORAJA
272	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 BONGGAKARADENG	SMAN 7 TANA TORAJA
273	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 SALUPUTTI	SMAN 8 TANA TORAJA
274	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 2 MENGKENDEK	SMAN 9 TANA TORAJA
275	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 MASANDA	SMAN 10 TANA TORAJA
276	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 BITTUANG	SMAN 11 TANA TORAJA
277	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 MAPPAK	SMAN 12 TANA TORAJA
278	UPT. Wil. Tana Toraja	SMAN 1 SIMBUANG	SMAN 13 TANA TORAJA
279	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 RANTEPAO	SMAN 1 TORAJA UTARA
280	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 2 RANTEPAO	SMAN 2 TORAJA UTARA
281	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 SESEAN	SMAN 3 TORAJA UTARA
282	UPT. Wil. Toraja Utara	SMAN 1 RINDINGALLO	SMAN 4 TORAJA UTARA
283	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 TONDON	SMAN 5 TORAJA UTARA
284	UPT. Wil. Toraja Utara	SMAN 1 Kesu	SMAN 6 TORAJA UTARA
285	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 SA DAN	SMAN 7 TORAJA UTARA
286	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 BUNTU PEPASAN	SMAN 8 TORAJA UTARA
287	UPT. Wil. Toraja Utara	SMA Negeri 1 Nanggala	SMAN 9 TORAJA UTARA
288	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 SENGKANG	SMAN 1 WAJO
289	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 MAJAULENG	SMAN 2 WAJO

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
290	UPT. Wil. Wajo	SMAN 2 SENGKANG	SMAN 3 WAJO
291	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 MANIANGPAJO	SMAN 4 WAJO
292	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 BELAWA	SMAN 5 WAJO
293	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 PITUMPANUA	SMAN 6 WAJO
294	UPT. Wil. Wajo	SMAN 3 SENGKANG	SMAN 7 WAJO
295	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 PENRANG	SMAN 8 WAJO
296	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 PAMMANA	SMAN 9 WAJO
297	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 SABBANGPARU	SMAN 10 WAJO
298	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 TAKALALLA	SMAN 11 WAJO
299	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 KEERA	SMAN 12 WAJO
300	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 BOLA	SMAN 13 WAJO
301	UPT. Wil. Wajo	SMAN 2 PITUMPANUA	SMAN 14 WAJO
302	UPT. Wil. Wajo	SMAN 1 SAJOANGING	SMAN 15 WAJO
303	UPT. Wil. Makassar	SMAN 1 MAKASSAR	SMAN 1 MAKASSAR
304	UPT. Wil. Makassar	SMAN 2 MAKASSAR	SMAN 2 MAKASSAR
305	UPT. Wil. Makassar	SMAN 3 MAKASSAR	SMAN 3 MAKASSAR
306	UPT. Wil. Makassar	SMAN 4 MAKASSAR	SMAN 4 MAKASSAR
307	UPT. Wil. Makassar	SMAN 5 MAKASSAR	SMAN 5 MAKASSAR
308	UPT. Wil. Makassar	SMAN 6 MAKASSAR	SMAN 6 MAKASSAR
309	UPT. Wil. Makassar	SMAN 7 MAKASSAR	SMAN 7 MAKASSAR
310	UPT. Wil. Makassar	SMAN 8 MAKASSAR	SMAN 8 MAKASSAR
311	UPT. Wil. Makassar	SMAN 9 MAKASSAR	SMAN 9 MAKASSAR
312	UPT. Wil. Makassar	SMAN 10 MAKASSAR	SMAN 10 MAKASSAR
313	UPT. Wil. Makassar	SMAN 11 MAKASSAR	SMAN 11 MAKASSAR
314	UPT. Wil. Makassar	SMAN 12 MAKASSAR	SMAN 12 MAKASSAR
315	UPT. Wil. Makassar	SMAN 13 MAKASSAR	SMAN 13 MAKASSAR
316	UPT. Wil. Makassar	SMAN 14 MAKASSAR	SMAN 14 MAKASSAR
317	UPT. Wil. Makassar	SMAN 15 MAKASSAR	SMAN 15 MAKASSAR
318	UPT. Wil. Makassar	SMAN 16 MAKASSAR	SMAN 16 MAKASSAR
319	UPT. Wil. Makassar	SMAN 17 MAKASSAR	SMAN 17 MAKASSAR
320	UPT. Wil. Makassar	SMAN 18 MAKASSAR	SMAN 18 MAKASSAR
321	UPT. Wil. Makassar	SMAN 19 MAKASSAR	SMAN 19 MAKASSAR
322	UPT. Wil. Makassar	SMAN 20 MAKASSAR	SMAN 20 MAKASSAR
323	UPT. Wil. Makassar	SMAN 21 MAKASSAR	SMAN 21 MAKASSAR
324	UPT. Wil. Makassar	SMAN 22 MAKASSAR	SMAN 22 MAKASSAR
325	UPT. Wil. Makassar	SMAN 23 MAKASSAR	SMAN 23 MAKASSAR
326	UPT. Wil. Palopo	SMAN 1 PALOPO	SMAN 1 PALOPO
327	UPT. Wil. Palopo	SMAN 2 PALOPO	SMAN 2 PALOPO
328	UPT. Wil. Palopo	SMAN 3 PALOPO	SMAN 3 PALOPO
329	UPT. Wil. Palopo	SMAN 4 PALOPO	SMAN 4 PALOPO
330	UPT. Wil. Palopo	SMAN 5 PALOPO	SMAN 5 PALOPO
331	UPT. Wil. Palopo	SMAN 6 PALOPO	SMAN 6 PALOPO
332	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 1 PAREPARE	SMA NEGERI 1 PAREPARE
333	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 2 PAREPARE	SMA NEGERI 2 PAREPARE

NO	KAB/KOTA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
334	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 3 PAREPARE	SMA NEGERI 3 PAREPARE
335	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 4 PAREPARE	SMA NEGERI 4 PAREPARE
336	UPT. Wil. Pare-Pare	SMA NEGERI 5 PAREPARE	SMA NEGERI 5 PAREPARE



DR. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH., M.SI., MH.